

Tantangan implementasi Integrated Sustainability Reporting di Indonesia Pada Era Pelaporan Wajib

Nurmala Dewi

Universitas Muhammadiyah Tangerang

e-mail: nurmalad028@email.com

Article Info

Article history:

Received 08-06-2026

Revised 26-06-2026

Accepted 20-07-2026

Kata kunci:

Integrated Sustainability Reporting, Pelaporan Keberlanjutan Wajib, OJK, IFRS S1 dan S2, Materialitas, Indonesia.

ABSTRAK

Pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah memasuki babak baru sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penerbitan laporan keberlanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, dan babak ini semakin ditegaskan dengan pengesahan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia pada 1 Juli 2025, yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 dan akan berlaku efektif per 1 Januari 2027. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis tantangan implementasi Integrated Sustainability Reporting (ISR) di Indonesia pada masa transisi menuju rezim pelaporan wajib tersebut. Dengan pendekatan tinjauan literatur naratif-kritis (critical narrative review) terhadap publikasi ilmiah, laporan resmi regulator, dan dokumen kebijakan tahun 2020–2026, penelitian ini mengidentifikasi empat kelompok tantangan utama, yaitu keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi, persoalan kualitas dan keandalan data, kesulitan dalam penentuan materialitas, serta rendahnya pemahaman terhadap standar pelaporan yang terus berevolusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan belum serta-merta menghasilkan pelaporan yang bermakna secara substantif, karena masih banyak perusahaan yang cenderung memenuhi kepatuhan secara simbolis (symbolic compliance) ketimbang menginternalisasi nilai keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Artikel ini juga menelaah dampak kewajiban pelaporan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas ISR yang mencakup penguatan tata kelola keberlanjutan, investasi pada sistem data terintegrasi, kolaborasi lintas regulator, dan penyediaan asuransi independen.



©2023 Authors. Published by Sabajaya Publisher. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Selama satu dekade terakhir, cara perusahaan mengomunikasikan kinerjanya kepada pemangku kepentingan telah bergeser secara mendasar. Jika dahulu laporan tahunan cukup berhenti pada angka-angka keuangan, kini investor, kreditor, regulator, dan masyarakat menuntut gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah entitas menciptakan nilai dalam jangka panjang, termasuk bagaimana ia mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pergeseran ini melahirkan gagasan integrated reporting, yaitu kerangka pelaporan yang berupaya menyatukan informasi keuangan dan non-keuangan ke dalam satu narasi yang koheren tentang penciptaan nilai, dengan menonjolkan keterkaitan antara strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek masa depan perusahaan (Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 2026). Ketika gagasan ini dipadukan dengan praktik pelaporan keberlanjutan yang sudah lebih dahulu berkembang, muncullah istilah Integrated Sustainability Reporting (ISR), yang pada intinya adalah pelaporan keberlanjutan yang tidak berdiri sendiri sebagai dokumen terpisah, melainkan terhubung erat dengan laporan keuangan dan strategi bisnis perusahaan secara menyeluruh.

Di Indonesia, fondasi regulasi bagi laporan keberlanjutan sesungguhnya sudah diletakkan sejak beberapa waktu lalu. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang secara bertahap mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 2026; IIETA, 2023). Regulasi ini menjadi titik tolak penting karena untuk pertama kalinya laporan keberlanjutan tidak lagi

bersifat sukarela, melainkan menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan dipublikasikan di situs web perusahaan serta disampaikan kepada OJK (IEC, 2026). Momentum reformasi semakin menguat pada 1 Juli 2025, ketika Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 dan akan berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 (IAI, 2025; OJK, 2025). Perubahan lanskap regulasi ini menuntut perusahaan beralih dari model pelaporan naratif dan longgar menuju pengungkapan yang lebih terukur, berbasis metrik, dan terhubung langsung dengan laporan keuangan (BINUS Accounting, 2025), padahal sebagian besar laporan keberlanjutan di Indonesia belum diaudit atau memperoleh asurans pihak ketiga, sehingga muncul kekhawatiran mengenai keandalan data dan potensi praktik greenwashing (Sustainahaus, 2025; Suhardjo, Akroyd, & Suparman, 2026).

Literatur mengenai pelaporan keberlanjutan di Indonesia berkembang pesat, namun sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada penelitian kuantitatif yang menguji determinan kualitas atau luas pengungkapan laporan keberlanjutan (IIETA, 2023; Sebrina, Taqwa, Afriyenti, & Septiari, 2023; Ahadiat, Shamim, Jimad, & Kesumah, 2024), maupun kajian konseptual yang memetakan tren riset sustainability reporting secara umum tanpa menyoroti secara spesifik bagaimana perusahaan Indonesia mempersiapkan diri menghadapi transisi menuju rezim pelaporan wajib berbasis IFRS S1 dan S2 (Sintadevi, Wibawa Yasa, & Prita Utami, 2024; Hidayati, 2023). Yang relatif belum banyak dieksplorasi adalah bagaimana tantangan implementasi ISR—mencakup keterbatasan sumber daya, kualitas data, penentuan materialitas, dan kesenjangan pemahaman standar—saling berkelindan dan membentuk siklus yang memperkuat pola pelaporan simbolis, khususnya pada masa transisi menjelang pemberlakuan SPK tahun 2027. Studi Suhardjo, Akroyd, dan Suparman (2026) memang telah mengidentifikasi empat tantangan yang saling terkait, namun belum mengaitkan temuannya dengan konteks kebijakan paling mutakhir. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan sintesis kritis yang menghubungkan tantangan implementasi ISR dengan konteks regulasi paling terkini, sekaligus merumuskan strategi peningkatan kualitas pelaporan yang relevan dengan tahapan transisi yang tengah dijalani perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, artikel ini disusun dengan empat tujuan utama, yaitu memetakan perkembangan ISR di Indonesia sejak era POJK Nomor 51/2017 hingga peluncuran SPK berbasis IFRS S1 dan S2; mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis tantangan-tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan ISR; mengevaluasi dampak kewajiban pelaporan keberlanjutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan; serta merumuskan strategi yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi ISR pada masa transisi menuju rezim pelaporan wajib penuh pada tahun 2027.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur naratif-kritis (critical narrative literature review) yang bertujuan menyintesis, membandingkan, dan mengevaluasi temuan dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan terkait Integrated Sustainability Reporting di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat multidimensional dan berkembang cepat, sehingga tinjauan naratif-kritis dianggap lebih sesuai dibandingkan meta-analisis kuantitatif yang mensyaratkan homogenitas desain penelitian pada sumber-sumber primer yang direview.

Sumber data yang digunakan meliputi tiga kategori, yaitu artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020 hingga 2026 (baik terindeks Scopus maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA), laporan resmi dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh regulator dan otoritas standar (khususnya OJK dan IAI), serta publikasi profesional dari organisasi akuntansi internasional dan firma konsultan yang relevan dengan proses adopsi IFRS S1 dan S2. Proses pengumpulan sumber dilakukan melalui penelusuran daring dengan kata kunci meliputi kombinasi istilah “integrated reporting”, “sustainability reporting”, “mandatory sustainability disclosure”, “IFRS S1 S2”, dan “Indonesia”. Sumber yang terkumpul kemudian disaring berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian, yakni tantangan implementasi, dampak kewajiban pelaporan, konteks regulasi, dan strategi peningkatan kualitas pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam tema-tema besar, kemudian membandingkan dan mengontraskan temuan tersebut untuk menghasilkan sintesis kritis, bukan sekadar rangkuman deskriptif. Keterbatasan

metode ini terletak pada sifatnya yang interpretatif, sehingga pemilihan tema dan penekanan analisis tidak terlepas dari perspektif penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Integrated Sustainability Reporting (ISR) di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan menuju upaya integrasi pelaporan keberlanjutan dengan strategi bisnis perusahaan. Pada awal diberlakukannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, sebagian besar perusahaan masih menyusun laporan keberlanjutan sebagai dokumen terpisah dari laporan tahunan sehingga bentuk maupun kedalaman pengungkapannya belum seragam. Kondisi tersebut mulai mengalami perubahan ketika Indonesia mempersiapkan adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 yang disahkan pada tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Standar tersebut menuntut perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan yang lebih terukur, relevan, serta terhubung dengan informasi keuangan. Meskipun demikian, kesiapan perusahaan dalam memenuhi tuntutan tersebut masih beragam karena kemampuan sumber daya, sistem informasi, dan tata kelola keberlanjutan belum berkembang secara merata.

Dalam proses implementasinya, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, kompetensi sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan, khususnya perusahaan berskala menengah, masih bergantung pada konsultan eksternal dalam menyusun laporan keberlanjutan karena belum memiliki tenaga internal yang memahami standar pelaporan keberlanjutan secara memadai. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan laporan belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya organisasi, melainkan masih dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulasi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas dan keandalan data keberlanjutan. Berbeda dengan data keuangan yang telah memiliki sistem pencatatan yang relatif mapan, data non-keuangan seperti emisi karbon, konsumsi energi, penggunaan air, maupun indikator sosial masih banyak dikumpulkan secara manual dan berasal dari berbagai unit kerja yang berbeda. Akibatnya, konsistensi serta keakuratan data menjadi sulit dijaga. Rendahnya penggunaan jasa asurans independen terhadap laporan keberlanjutan juga meningkatkan risiko munculnya praktik greenwashing sehingga dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disampaikan perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga menghadapi kesulitan dalam menentukan materialitas isu keberlanjutan. Perbedaan pendekatan antara standar GRI yang menggunakan konsep double materiality dengan IFRS S1 dan IFRS S2 yang lebih menitikberatkan pada materialitas finansial sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan isu mana yang perlu diprioritaskan. Tidak sedikit perusahaan yang masih mengalami kesulitan menghubungkan dampak keberlanjutan dengan risiko maupun peluang yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman terhadap standar pelaporan keberlanjutan yang terus berkembang. Beragamnya kerangka pelaporan, mulai dari GRI, TCFD hingga SPK berbasis IFRS S1 dan IFRS S2, membuat perusahaan harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas organisasi, kondisi tersebut berpotensi menghasilkan laporan yang hanya memenuhi aspek administratif tanpa mencerminkan implementasi keberlanjutan yang sesungguhnya. Ringkasan keempat kelompok tantangan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Empat Kelompok Tantangan Implementasi ISR di Indonesia

No.	Kelompok Tantangan	Deskripsi Singkat
1	Keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi	Anggaran, keahlian SDM, dan infrastruktur TI yang terbatas membuat perusahaan sulit merekrut/melatih staf yang memahami pengukuran emisi, analisis skenario iklim, dan kerangka ISSB; banyak perusahaan menengah masih bergantung pada konsultan eksternal.

2	Persoalan kualitas dan keandalan data	Data non-keuangan (emisi karbon, energi, ketenagakerjaan) umumnya dikumpulkan manual dan belum terintegrasi; mayoritas laporan belum memperoleh asurans independen sehingga rawan praktik greenwashing.
3	Kesulitan penentuan materialitas	Perbedaan filosofi antara materialitas ganda (GRI) dan materialitas finansial (IFRS S1/S2) menimbulkan kebingungan mengenai isu keberlanjutan yang perlu diprioritaskan dan cara mendokumentasikan proses asesmennya.
4	Kesenjangan pemahaman terhadap standar yang terus berevolusi	Proliferasi kerangka pelaporan (GRI, TCFD, SPK berbasis IFRS S1/S2) serta perbedaan persepsi manajer mengenai manfaat integrated reporting memperlambat pembentukan visi strategis internal perusahaan.

Di sisi lain, penerapan kewajiban pelaporan keberlanjutan juga memberikan sejumlah dampak positif. Semakin banyak perusahaan mulai mengungkapkan informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih sistematis sehingga transparansi perusahaan meningkat. Kewajiban tersebut juga mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan pencapaian kinerja keberlanjutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Namun demikian, peningkatan transparansi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas informasi yang disampaikan. Masih rendahnya tingkat asurans independen serta kecenderungan sebagian perusahaan melakukan pelaporan yang bersifat simbolis menyebabkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan belum meningkat secara optimal.

Perubahan regulasi yang dilakukan oleh OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan praktik pelaporan keberlanjutan dengan perkembangan standar internasional. Pengesahan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan. Selain memperkuat aspek transparansi, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterbandingan laporan antarperusahaan sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih bermanfaat bagi investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, implementasi standar baru tetap memerlukan masa transisi yang disertai pendampingan agar perusahaan dapat menyesuaikan sistem pelaporan yang dimiliki.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi Integrated Sustainability Reporting di Indonesia. Perusahaan perlu memperkuat tata kelola keberlanjutan melalui pembentukan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan isu keberlanjutan. Selain itu, investasi pada sistem informasi yang terintegrasi juga diperlukan agar data keberlanjutan dapat dikumpulkan secara konsisten dan akurat. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai IFRS S1, IFRS S2, analisis materialitas, serta pengukuran indikator keberlanjutan juga menjadi faktor yang sangat penting. Upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan penggunaan jasa asurans independen serta kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan dunia usaha dalam menyusun pedoman implementasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, implementasi ISR diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa Integrated Sustainability Reporting di Indonesia tengah berada pada titik transisi yang krusial, didorong oleh pengesahan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan S2 pada 2025 yang akan berlaku efektif penuh pada 2027. Perjalanan regulasi sejak POJK Nomor 51/2017 telah berhasil meningkatkan kuantitas dan keteraturan penerbitan laporan keberlanjutan, namun peningkatan kualitas substantif berjalan jauh lebih lambat dan tidak merata antarperusahaan. Empat tantangan utama—keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi,

persoalan kualitas dan keandalan data, kesulitan penentuan materialitas, serta kesenjangan pemahaman terhadap standar yang terus berevolusi—terbukti saling terkait dan membentuk siklus yang melanggengkan pola pelaporan yang bersifat simbolis ketimbang substantif. Dari sisi dampak, kewajiban pelaporan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas formal perusahaan, namun dampak terhadap kepercayaan pemangku kepentingan masih bersifat ambivalen, mengingat rendahnya tingkat asurans independen dan masih dominannya pola kepatuhan yang bersifat kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiat, A., Shamim, A., Jimad, H., & Kesumah, F. S. D. (2024). Assessing the impact of sustainability report disclosures and CEO attributes on the Indonesian energy sector: implications for capital market performance. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2392044>
- Arkoh, P., Costantini, A., & Scarpa, F. (2024). Determinants of sustainability reporting: A systematic literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1578–1597. <https://doi.org/10.1002/csr.2645>
- BINUS Accounting. (2025, 18 Desember). Accounting – IFRS S1 & S2 Sustainability Standards: Preparing Indonesia for the 2027 Deadline. <https://accounting.binus.ac.id/2025/12/18/ifrs-s1-s2-sustainability-standards-preparing-indonesia-for-the-2027-deadline/>
- Determinants of Sustainability Report Quality in Indonesian Public Companies: An Isomorphism Theory Approach. (2023). *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(12), 3909–3921. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181222>
- Dewi, K. G. P., Martini, N. P. R., & Ratnasari, N. M. D. (2026). The impact of sustainability reports, sustainability accounting, and environmental innovation on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs): Empirical evidence on consumer goods companies in the food and beverage sub-sector in Indonesia. *Journal of Governance, Taxation, and Auditing*, 4(3), 673–682. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/download/1791/1476/7804>
- Hidayati, I. (2023). Sustainability Reporting in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 213–246. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.319>
- IFAC. (2025, 2 September). How Ikatan Akuntan Indonesia Strengthened Indonesia's Role in the Global Sustainability Reporting Landscape. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/how-ikatan-akuntan-indonesia-strengthened-indonesia-s-role-global-sustainability-reporting-landscape>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2025). Indonesia Launches Sustainability Disclosure Standards based on IFRS S1 and S2. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/indonesia_launches_sustainability_disclosure_standards_based_on_ifrs_s1_and_s2
- Indonesia Environment & Energy Center (IEC). (2026). Sustainability Report Indonesia 2026: Panduan POJK 51, GRI & IFRS. <https://environment-indonesia.com/laporan-keberlanjutan-sustainability-report-indonesia/>
- Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. (2026). Integrasi ISSB dan Integrated Reporting dalam pelaporan korporasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 2(4), 829–839. <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jakp/article/download/1306/1280/3800>
- Journal of Law, Administration, and Social Science. (2024). Perkembangan sustainability reporting dan integrated reporting di Indonesia: Sebuah scoping review. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6). <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/download/737/811/8303>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan IAI. Sustainable Finance OJK. <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/newsmedia/detailnews/3842/peluncuran-standar-pengungkapan-keberlanjutan-iai>

-
- Ramadhan, et al. (2024). The Quality of Sustainability Reporting in Indonesia: Government, Employee, Competitor, and Customer Perspective. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/download/30011/12215/115450>
- Sebrina, N., Taqwa, S., Afriyenti, M., & Septiari, D. (2023). Analysis of sustainability reporting quality and corporate social responsibility on companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2157975>
- Sintadevi, N. P. R., Wibawa Yasa, G. S., & Prita Utami, M. A. J. (2024). Sustainability Reporting dan Green Accounting: Systematic Literature Review. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 8(2), 133–143. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.1876>
- Sustainability. (2023). Sustainability Reports and Disclosure of the Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from Indonesian Listed Companies. *Sustainability*, 15(24), 16919. <https://doi.org/10.3390/su152416919>
- Sustainability Reporting Trends: A Systematic Literature Review. (2026). *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijes/article/view/15793>
- Sustainahaus. (2025, 29 Juli). Trends in Sustainability Reporting in Indonesia: A Local Perspective. <https://www.sustainahaus.com/articles/trends-in-sustainability-reporting-in-indonesia-a-local-perspective>
- Suhardjo, I., Akroyd, C., & Suparman, M. (2026). Beyond compliance: sustainability reporting challenges and the future of integrated reporting in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 34(3), 536–554. <https://doi.org/10.1108/ARA-06-2024-0190>
- Determinants of Integrated Reporting Disclosure in Indonesian Companies. (2025). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(3). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i3.1340>